

ABSTRAK

Safrina Rahmawati. 2026. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H., Pembimbing (II) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mengancam hak korban atas keamanan, martabat, dan akses terhadap pendidikan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan tiga instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), UU TPKS, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Penelitian ini selanjutnya menganalisis bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh masing-masing instrumen serta mengevaluasi sejauh mana ketiga peraturan tersebut telah terharmonisasi dalam praktik. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta diinterpretasikan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, masing-masing instrumen hukum memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar umum untuk mengkriminalisasi dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan komprehensif yang berorientasi pada korban melalui pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi, sedangkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 membentuk mekanisme kelembagaan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Kedua, analisis berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali* menunjukkan bahwa ketiga instrumen tersebut mencerminkan harmonisasi fungsional, bukan konflik normatif. Ketiga, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan relasi kuasa, lemahnya koordinasi antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum, kapasitas kelembagaan satuan tugas kampus yang belum merata, serta masih kuatnya budaya menyalahkan korban (*victim-blaming*). Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi pada tingkat implementasi, peningkatan komitmen kelembagaan di lingkungan perguruan tinggi, serta optimalisasi peran Satgas PPKS guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan tetap berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban Kekerasan Seksual; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ABSTRACT

Safrina Rahmawati. 2026. *Juridical Analysis of Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education Institutions Based on the New Indonesian Criminal Code, the Law on the Crime of Sexual Violence, and the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021*. Undergraduate Thesis. Law Study Program, Faculty of Law, Universitas PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H., Supervisor (II) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.

*Sexual violence within higher education institutions constitutes a serious violation of human rights that undermines victims' rights to safety, dignity, and access to education. This study examines the legal protection afforded to victims of sexual violence in Indonesian higher education institutions under three legal instruments: the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023), the Law on the Crime of Sexual Violence (Law Number 12 of 2022), and the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021. It further analyzes the forms of protection provided under each instrument and evaluates the extent to which these regulations are harmonized in practice. Employing normative legal research through statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and interpreted qualitatively using legal interpretation and legal argumentation. Three main findings emerge. First, each legal instrument performs a distinct yet complementary function: the Criminal Code provides the general basis for criminalizing and sanctioning perpetrators, the Law on the Crime of Sexual Violence establishes comprehensive victim-oriented protection through prevention, handling, protection, recovery, and restitution, while Ministerial Regulation Number 30 of 2021 creates an institutional mechanism through the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS). Second, analysis based on the principles of *lex superior derogat legi inferiori* and *lex specialis derogat legi generali* demonstrates that the three instruments reflect functional harmonization rather than normative conflict. Third, implementation remains constrained by unequal power relations, weak coordination between universities and law enforcement agencies, uneven institutional capacity of campus task forces, and a persistent victim-blaming culture. This study recommends strengthening implementation-level harmonization, institutional commitment, and the role of the Satgas PPKS to ensure effective legal protection centered on victims' rights.*

Keywords: Legal Protection; Victims of Sexual Violence, Criminal Code.